

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Sosialisasi Politik**

##### **2.1.1. Definisi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi memiliki arti sebagai suatu proses beradaptasi dengan kebudayaan masyarakat di lingkungannya<sup>4</sup>. Dari pengertian tersebut sosialisasi berarti penyampaian suatu nilai ataupun kebudayaan dalam lingkungannya terhadap masyarakat tersebut. Sosialisasi menurut Alex dalam (dalam Gatara and Said, Moh 2011) yaitu suatu proses seseorang dalam mendapatkan ilmu atau pengetahuan, keyakinan, dan sikap politik. Terdapat dua aspek penting dalam sosialisasi politik, yaitu terkait proses dan tujuannya (Gatara and Said, Moh 2011). Proses yang memiliki makna ini dapat dihubungkan dengan dimensi politik serta memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik masyarakat. Menurut Althoff (dalam Damsar 2010), sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memperkenalkan individu ke dalam sistem politik dan membentuk bagaimana mereka merespons serta menanggapi berbagai fenomena politik.

Menurut (Almond n.d.) sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses pembentukan perilaku dan sikap politik, sekaligus sebagai cara bagi satu

---

<sup>4</sup> "Sosialisasi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Diakses 5 Desember 2024), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sosialisasi>.

generasi untuk mewariskan nilai-nilai dan keyakinan politik kepada generasi selanjutnya. Menurut (Surbakti 2010), sosialisasi merupakan suatu langkah atau proses untuk menyampaikan pesan politik. Sosialisasi politik sendiri termasuk kedalam bentuk pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

### **2.1.2. Agen Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik adalah proses di mana individu belajar tentang nilai, norma, dan informasi yang terkait dengan politik, sehingga mereka memahami peran mereka dalam sistem politik dan dapat berpartisipasi dengan lebih baik. Proses ini melibatkan berbagai agen sosialisasi yang berperan penting dalam membentuk orientasi politik seseorang sejak usia dini hingga dewasa. Agen sosialisasi politik ini berperan besar dalam mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku politik individu.

Menurut (Haryanto 2018), dalam bukunya yang berjudul *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*, menjelaskan bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa, dan organisasi masyarakat.

#### **1) Keluarga**

Keluarga adalah agen sosialisasi politik yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan politik setiap individu. Karena keluarga adalah lingkungan pertama dan paling dekat, nilai-nilai politik yang diterapkan di dalam keluarga akan sangat mempengaruhi pemahaman dan sikap politik anggota keluarganya.

Salah satu tantangan sosialisasi politik di Indonesia terkait peran keluarga adalah kondisi sosial ekonomi banyak keluarga yang masih rendah. Akibatnya, mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dibandingkan pada pendidikan atau sosialisasi politik (Althoff 2005).

## 2) Sekolah

Orang berpendidikan cenderung lebih memahami dampak pemerintah terhadap hidup mereka, lebih memperhatikan dinamika politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses politik, dan lebih kompeten dalam bertindak secara politis. Sekolah memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang dunia politik dan peran mereka di dalamnya. Sekolah juga memperkenalkan lembaga dan hubungan politik secara nyata serta menjadi "jalur pewarisan" nilai dan sikap dalam masyarakat. Selain itu, sekolah berperan penting dalam membentuk sikap terhadap "aturan main politik" yang tidak tertulis.

## 3) Kelompok Pergaulan

Walaupun sekolah dan keluarga adalah sarana utama dalam sosialisasi, ada juga unit sosial lain yang mempengaruhi sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, yang mencakup kelompok bermain di masa kecil, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja kecil, di mana anggota memiliki kedudukan yang relatif setara serta ikatan yang kuat. Individu dalam kelompok ini sering menyesuaikan pandangannya dengan anggota lain, baik karena rasa

suka, hormat, atau keinginan untuk serupa. Dengan demikian, kelompok pergaulan membantu mensosialisasikan anggotanya dengan mendorong mereka untuk mengikuti sikap dan perilaku kelompok.

#### 4) Media Massa

Masyarakat modern sangat bergantung pada komunikasi dan informasi yang luas, cepat, dan relatif seragam. Berita tentang peristiwa di berbagai belahan dunia dapat segera diketahui masyarakat dalam hitungan jam. Sebagian besar masyarakat, terutama yang lebih modern, menjadi seperti satu kelompok besar penonton yang turut merasakan peristiwa yang sama dan dipengaruhi oleh selera serupa. Media massa, seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan majalah, memainkan peran penting dalam menyebarkan sikap dan nilai-nilai modern ke negara-negara baru yang merdeka.

#### 5) Organisasi Masyarakat

Sebagai agen sosialisasi politik, organisasi masyarakat berperan besar dalam mengedukasi, mengadvokasi, dan mengorganisir masyarakat. Mereka membantu individu dan komunitas memahami hak dan tanggung jawab politik mereka, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik. Dengan cara ini, organisasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi, sehingga turut mendukung terciptanya masyarakat yang lebih peka, responsif, dan partisipatif.

### 2.1.3. Metode Sosialisasi Politik

Menurut (Dawson 1977) sosialisasi politik dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi politik yang dilakukan secara langsung terbagi menjadi empat jenis, antara lain:

#### 1) Imitasi (*Imitation*)

Imitasi berarti meniru. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah meniru orang lain, baik disengaja maupun tidak. Imitasi ini dianggap wajar karena sering terjadi dalam masyarakat. Orang biasanya meniru nilai-nilai atau pola perilaku dari orang-orang yang lebih tua, memiliki otoritas, atau yang dihormati di sekitarnya.

#### 2) Sosialisasi Politik Antisipatoris

Sosialisasi politik antisipatoris adalah tahap dalam sosialisasi politik di mana seseorang mempersiapkan diri sebelum menjalankan peran atau jabatan tertentu. Orang yang ingin menempati posisi atau jabatan tertentu biasanya mulai mengadopsi nilai, sikap, atau perilaku yang sesuai dengan peran tersebut jauh sebelum benar-benar menduduki posisi atau profesi tersebut.

#### 3) Edukasi atau Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah usaha nyata untuk menanamkan nilai, sikap, dan orientasi politik kepada masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, dan partai politik. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

#### 4) Pengalaman Politik

Seperti halnya pengalaman hidup pada umumnya, pengalaman politik merupakan pembelajaran berharga bagi individu dalam berinteraksi di masyarakat. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan mereka yang lebih sering mengalami berbagai tantangan biasanya lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Hal yang sama berlaku di bidang politik, seseorang yang sering terlibat dalam kegiatan politik tentu memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan mereka yang jarang terlibat. Pengalaman politik yang beragam ini akan mempengaruhi sikap atau pandangan seseorang terhadap sistem politik yang ada.

#### 2.1.4. Tujuan Sosialisasi Politik

Menurut (Anggara 2013) penyelenggaraan sosialisasi politik oleh negara bertujuan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang membentuk pola keyakinan dan kepercayaan masyarakat, yang berperan penting dalam mengarahkan bangsa menuju kemajuan dan kejayaannya. Dengan demikian, tujuan dari sosialisasi politik dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu

##### 1) Dimensi psikologis

Dalam sosialisasi politik berfokus pada pembentukan sikap dan kepribadian politik, yang berkaitan erat dengan aspek-aspek psikologis individu. Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari tahap pemahaman atau pengenalan politik (*political cognition*). Pada tahap ini, individu mulai memahami konsep-konsep politik dasar.

Selanjutnya, proses ini berkembang menjadi pendalaman makna politik, yang berdampak pada pola pikir dan memperluas wawasan individu terhadap berbagai referensi pemikiran, dikenal sebagai tahap sikap afektif (*political affection*). Pada tahap ini, individu mulai menunjukkan preferensi tertentu sesuai minatnya.

Penghayatan berkelanjutan disertai keyakinan akhirnya membentuk kepribadian politik (*political personality*), yang tercermin dalam perilaku dan sikap politik (*political behavior*). Proses ini mencapai tahap kematangan politik (*political maturity*) atau tahap psikomotorik, di mana individu mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem politik, sekaligus berkontribusi pada pelestarian sistem tersebut.

## 2) Dimensi ideologis

Dimensi ideologis mencerminkan penerimaan individu terhadap ideologi yang menjadi pola keyakinan. Pada tahap ini, simbol-simbol politik telah diinternalisasi sebagai bagian dari keyakinan politik, sehingga ideologi menjadi landasan nilai yang memandu sikap dan perilaku dalam kehidupan bernegara. Pengaruh-pengaruh eksternal atau kontemporer tidak memiliki dampak yang signifikan pada individu yang telah sepenuhnya mengadopsi ideologi tersebut.

## 3) Dimensi normatif

Dimensi normatif menggambarkan kondisi di mana sikap mental dan pola pikir individu telah terintegrasi dalam sistem norma

yang berlaku. Norma di sini mencakup aturan-aturan yang dibentuk oleh penguasa serta nilai-nilai yang berkembang secara alami di masyarakat. Hal ini menciptakan kerangka perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima secara kolektif.

## **2.2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini mencerminkan bahwa suatu negara dapat dianggap demokratis jika pemerintah memberikan kebebasan yang luas bagi warganya untuk terlibat secara adil dalam berbagai kegiatan. Partisipasi politik menjadi ciri khas yang membedakan demokrasi dari sistem lainnya (Novaldi and Adnan 2021). Dengan kata lain, partisipasi politik adalah fondasi utama bagi sebuah negara dalam menerapkan sistem demokrasi.

(S. P. Huntington and Fukuyama 2006) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga negara secara individu dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Lebih lanjut, mereka juga menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat bersifat universal maupun kolektif, dilakukan secara terorganisir atau spontan, serta bisa berlangsung secara damai, dengan kekerasan, dalam koridor hukum, maupun di luar hukum.

Partisipasi politik mencerminkan keinginan seseorang untuk berperan dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif, termasuk menggunakan hak suara, berpartisipasi dalam berbagai organisasi, membahas isu-isu politik dengan pihak lain, serta turut serta dalam berbagai aksi dan gerakan. Selain itu,



partisipasi politik dapat diwujudkan dengan bergabung dalam partai politik atau organisasi independen, mendukung kampanye penyadaran, dan memberikan pelayanan kepada lingkungan dengan kemampuan yang dimiliki (Muhaling 2014).

Manfaat dari partisipasi politik yaitu, yang pertama memberikan dukungan kepada pemerintah, seperti dengan mengirimkan perwakilan, menyampaikan pernyataan dukungan, atau memilih calon yang diajukan organisasi politik. Kedua, menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubahnya. Terakhir, menjadi bentuk tantangan terhadap pemerintah untuk memicu perubahan struktural dalam sistem politik (Haris 2014).

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan memilih pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, khususnya melalui partisipasi dalam Pemilu, sangatlah penting. Di sisi lain, pemahaman mendalam mengenai peran strategis warga negara juga berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi (Liando 2016).

### **2.2.1. Tipologi Partisipasi Politik**

Dalam buku *The Comparative Study of Politics* yang dikutip oleh Damsar, Roth, dan Wilson mengembangkan tipologi partisipasi politik berdasarkan piramida partisipasi. Menurut pandangan mereka, piramida ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan tingkat keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, maka semakin sedikit jumlah orang yang terlibat. Tingkatan ini di antaranya adalah (Damsar 2010):

#### 1) Aktivis

Kelompok ini mencakup mereka yang berpartisipasi intens dan sangat terlibat dalam politik, seperti pemimpin dan fungsionaris partai atau kelompok kepentingan yang mengelola organisasi secara penuh waktu. Termasuk di sini juga aktivitas yang dianggap menyimpang atau negatif, seperti pembunuhan politik, terorisme, atau pembajakan untuk mencapai tujuan politik.

#### 2) Partisipan

Mereka yang masuk dalam kategori ini melakukan berbagai aktivitas seperti menjadi petugas dan juru kampanye, terlibat dalam program atau proyek sosial, bekerja sebagai pelobi politik, serta aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.

#### 3) Pengamat

Kelompok ini berpartisipasi dalam politik dengan keterlibatan yang minim, biasanya tidak intensif dan dilakukan secara *sporadis*. Contohnya termasuk memberikan suara dalam pemilu dan mendiskusikan isu-isu politik.

#### 4) Apolitik

Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki minat dalam urusan politik dan tidak menyumbangkan pandangan atau tindakan apapun terkait masalah politik.

Pembagian tingkat partisipasi politik ini menggambarkan variasi intensitas dan jenis keterlibatan politik, serta memudahkan dalam

memahami posisi seseorang atau kelompok, apakah sebagai pengamat, partisipan, atau aktivis. Setiap tingkat memiliki peran penting dalam lanskap politik dan tidak etis mengabaikan salah satu, karena masing-masing memiliki kontribusi vital.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

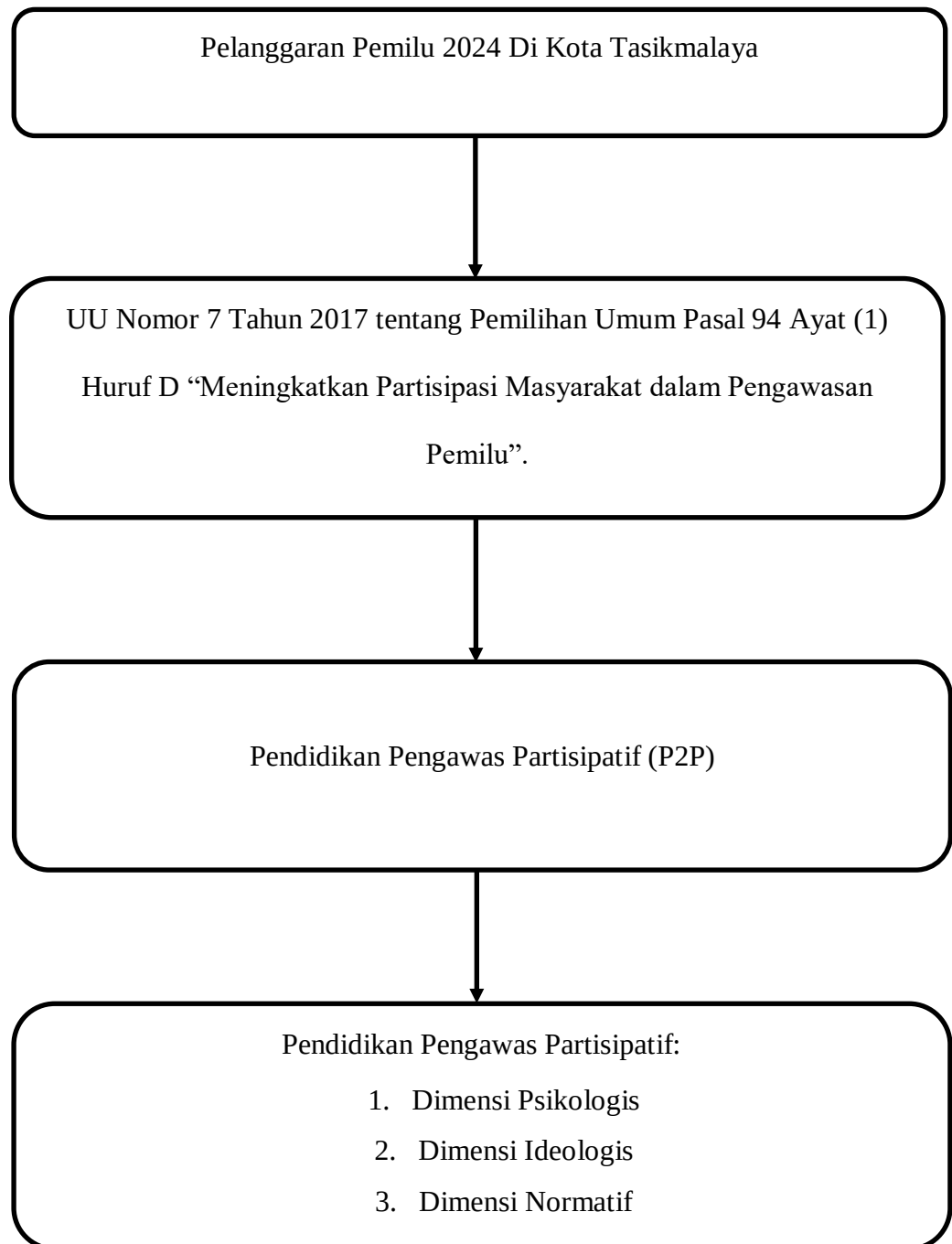
Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menentukan legitimasi pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan berbagai pelanggaran yang dapat mengancam integritas demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan pemilu menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan mencegah pelanggaran. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu adalah melalui Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan, penyelenggaraan, serta pengawasan pemilu. Dalam UU ini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, termasuk melalui keterlibatan masyarakat. Partisipasi politik dalam pengawasan pemilu dijamin dalam undang-undang ini sebagai bentuk penguatan demokrasi

partisipatif. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Bawaslu dapat menjalankan berbagai program, termasuk Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran politik masyarakat, Program P2P dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pemilu, regulasi yang berlaku, serta peran penting masyarakat dalam melakukan pengawasan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan jika terjadi pelanggaran.

Implementasi Program P2P diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kesadaran politik masyarakat serta keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan aturan pemilu, masyarakat dapat menjadi pengawas partisipatif yang mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran pemilu secara lebih efektif. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi terhadap terciptanya pemilu yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, maka kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya, dapat semakin meningkat.



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*